

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPENTINGAN DITJEN PDSPKP 2026

NO.	SUBYEK		SUMBER	BENTUK	SITUASI	PENILAIAN RISIKO				STRATEGI PENANGANAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB MITIGASI	MONITORING STATUS DAN CATATAN	KETERANGAN
	JENIS JABATAN	JABATAN				K	D	SKALA RISIKO	PETA RISIKO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Perencanaan	KPA, JF Perencana	Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru	Penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada mantan pejabat pada jabatan Pegawai tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya	Pegawai selaku pengelola perencanaan melakukan tugas/wewenang/proses bisnis, sementara di sisi lain terdapat kondisi penggunaan informasi internal yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ACCEPTABLE	1. Menerapkan kebijakan larangan penugasan Pegawai untuk memeriksa/ mengawasi unit kerja lamanya minimal selama 1 tahun pertama. 2. Memblokir hak akses/ akun sistem informasi internal terkait penganggaran. 3. Internalisasi pengelolaan Konflik Kepentingan dan Kode Etik secara berkala.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
			Penerimaan hadiah dan gratifikasi	Pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pegawai yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/ gratifikasi dari pihak, baik yang berkaitan langsung, maupun tidak langsung, terhadap keputusan dan/atau tindakan Pegawai tersebut.	Pegawai selaku pengelola perencanaan melakukan tugas/wewenang/proses bisnis, sementara di sisi lain terdapat kondisi penerimaan hadiah dan gratifikasi	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ACCEPTABLE	1. Melaporkan setiap penerimaan hadiah/fasilitas ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/KPK. 2. Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal. 3. Sosialisasi dan edukasi penanganan gratifikasi secara berkala.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
2	Pembuatan aturan dan kebijakan	Direktur Jenderal, Sesditjen, Direktur, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, JF Analis Hukum	Kepentingan bisnis atau finansial	Memiliki investasi, saham, atau kepemilikan usaha pada entitas luar yang bermitra dengan instansi.	Pegawai selaku pembuat aturan dan kebijakan, menyusun kebijakan, regulasi, atau standar tata kelola yang menguntungkan bisnis/perusahaan pribadi secara langsung atau tidak langsung.	2	2	4	4 RENDAH/ACCEPTABLE	1. Pengungkapan (disclosure) aset dan kepemilikan bisnis melalui LHKPN/LHKASN. 2. Mengungkapkan dan menandatangani Daftar Kepentingan Pribadi. 3. Sosialisasi dan edukasi penanganan gratifikasi secara berkala.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
			Hubungan afiliasi	Memiliki hubungan teman sejawat, mantan rekan kerja, atau keterikatan dalam organisasi/yayasan/lembaga yang sama	Pegawai selaku pembuat aturan dan kebijakan mengakomodasi klausul atau pasal-pasal kebijakan yang memberikan keistimewaan khusus bagi organisasi/lembaga nirlaba tertentu tempat Pejabat/Pegawai berafiliasi	2	2	4	4 RENDAH/ACCEPTABLE	1. Mengungkapkan dan menandatangani Daftar Kepentingan Pribadi. 2. Melibatkan tim interdisipliner dan pihak eksternal/akademisi dalam Uji Publik untuk memastikan objektivitas substansi regulasi.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
			Penerimaan hadiah dan gratifikasi	Pengambilan keputusan dan/atau penetapan aturan yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah, fasilitas, atau janji dari entitas usaha/asosiasi industri.	Pegawai selaku pembuat aturan dan kebijakan menjanjikan kelonggaran norma atau syarat aturan dalam rancangan kebijakan setelah menerima fasilitas/gratifikasi dari pemangku kepentingan.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ACCEPTABLE	1. Melaporkan setiap penerimaan hadiah/fasilitas ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/KPK. 2. Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal. 3. Sosialisasi dan edukasi penanganan gratifikasi secara berkala.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
3	Pengadaan barang dan jasa	PPK, JF PBJ, Bendahara Pengeluaran	Kepentingan bisnis atau finansial	Memiliki investasi, saham, atau kepemilikan usaha pada entitas luar yang bermitra dengan instansi.	Pegawai selaku pengelola pengadaan barang dan jasa memiliki berpihakan dalam proses lelang dan intervensi dalam setiap tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ACCEPTABLE	1. Pegawai mundur dari kepengurusan Pokja/PPK khusus untuk paket lelang yang diikuti perusahaan miliknya. 2. Melimpahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada UKPBJ KKP.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	
			Hubungan keluarga dan kerabat	Melibatkan hubungan darah/semenda (istri, anak, saudara, mertua, dll)	Pegawai selaku pengelola pengadaan barang dan jasa berupaya untuk memenangkan perusahaan milik kerabat/keuarga dalam pengadaan barang/jasa atau memberikan informasi bocoran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan HPS.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ACCEPTABLE	1. Pengelola pengadaan barang dan jasa wajib mendeklarasikan potensi konflik kepentingan sebelum proses pemilihan dimulai. 2. Melakukan penggantian (remove) personel atau pengambilalihan kewenangan oleh Atasan Pegawai. 3. Penerapan peer review berjenjang yang diperketat oleh Pengendali Mutu/Inspektorat.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/ Dalam Proses/ Belum Terlaksana	

				Hubungan afiliasi	Memiliki hubungan teman sejawat, mantan rekan kerja, atau keterikatan dalam organisasi/yayasan/lembaga yang sama	Pegawai selaku pengelola pengadaan barang dan jasa memberikan perlakuan khusus, penilaian teknis yang subjektif, atau kelonggaran verifikasi spesifikasi teknis untuk mitra/teman dekat.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Pengelola pengadaan barang dan jasa wajib mendeklarasikan potensi konflik kepentingan sebelum proses pemilihan dimulai. 2. Melakukan penggantian (remove) personel atau pengambilalihan kewenangan oleh Atasan Pegawai. 3. Penggunaan sistem evaluasi berbasis kuantitatif pada aplikasi SPSE/e-Katalog yang menutup peluang penilaian subjektif.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru	Penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada mantan pejabat pada jabatan Pegawai tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya	Pegawai selaku pengelola pengadaan barang dan jasa berupaya untuk mengondisikan penyusunan spesifikasi teknis/HPS, atau prioritas kelulusan lelang kepada penyedia barang/jasa yang merupakan mantan atasan/relasi dari instansi asal.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Pengelola pengadaan barang dan jasa wajib mendeklarasikan potensi konflik kepentingan sebelum proses pemilihan dimulai. 2. Melakukan penggantian (remove) personel atau pengambilalihan kewenangan oleh Atasan Pegawai. 3. Menggunakan instrumen penilaian berbasis data kuantitatif (sistem SPSE) yang baku dan menutup ruang penilaian subjektif.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Penerimaan hadiah dan gratifikasi	Penerimaan imbalan, uang komitmen (kickback), atau fasilitas liburan/akomodasi dari calon penyedia barang/jasa.	Pegawai selaku pengelola pengadaan barang dan jasa berupaya untuk mengondisikan penyusunan spesifikasi teknis (mengunci produk) agar mengarah pada salah satu penyedia yang memberikan imbalan.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Melaporkan setiap penerimaan hadiah/fasilitas ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/KPK. 2. Pengawasan ketat oleh APJP pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. 3. Sosialisasi dan edukasi penanganan gratifikasi secara berkala.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
4	Perizinan	Verifikator Perizinan, Petugas Pelayanan	Kepentingan bisnis atau finansial	Memiliki usaha pribadi, saham, atau menjadi konsultan perizinan di luar instansi pada sektor yang berkaitan dengan perizinan yang ditangani.	Pegawai selaku pengelola perizinan menjadi perantara/calo perizinan internal yang mempercepat izin usahanya sendiri atau pemohon yang membayar jasa konsultasi pribadinya.		1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Pegawai wajib mendeklarasikan hubungan kekeluargaan jika ada pemohon dari pihak kerabat. 2. Implementasi layanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik (tanpa tatap muka).													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Hubungan keluarga dan kerabat	Melibatkan hubungan darah/semenda (istri, anak, saudara, mertua, dll)	Pegawai selaku pengelola perizinan memprioritaskan verifikasi dan meloloskan persyaratan perizinan bagi berkas pemohon dari pihak keluarga tanpa mengikuti prosedur atau kriteria standar.	1	1	1	1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Pegawai wajib mendeklarasikan hubungan kekeluargaan jika ada pemohon dari pihak kerabat. 2. Mengalihkan tugas verifikasi (re-assignment) berkas tersebut kepada petugas/verifikator lain.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Hubungan afiliasi	Memiliki hubungan teman sejawat, mantan rekan kerja, atau keterikatan dalam organisasi/yayasan/lembaga yang sama	Pegawai selaku pengelola perizinan memberikan perlakuan khusus atau dispensasi kemudahan syarat perizinan kepada pemohon yang merupakan teman dekat/rekan organisasi.	2	2	4	4 RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Pegawai wajib mendeklarasikan hubungan kekeluargaan jika ada pemohon dari pihak kerabat. 2. Penerapan prinsip four-eyes principle (minimal dua verifikator independen dalam menyetujui dokumen). 3. Mematuhi Maklumat Pelayanan Publik.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru	Penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa kepada mantan pejabat/atasan lama yang mengurus perizinan usaha.	Pegawai selaku pengelola perizinan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) karena mendapat tekanan/pengaruh dari mantan pejabat atau relasi lama.	2	2	4	4 RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Penegakan SOP Pelayanan Publik secara konsisten berbasis Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terintegrasi. 2. Pelaporan intervensi/pengaruh tidak sah melalui sistem Whistleblowing System (WBS).													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	
				Penerimaan hadiah dan gratifikasi	Penerimaan uang pelicin (express fee), cendera mata, atau fasilitas dari pemohon izin agar berkas segera disetujui.	Pegawai selaku pengelola perizinan berupaya untuk mengulur-ulur waktu verifikasi perizinan pemohon sampai pemohon memberikan imbalan/hadiah.	2	2	4	4 RENDAH/ ACCEPTABLE	1. Penerapan sistem pelayanan no physical contact (secara daring/online). 2. Pelaporan ke UPG jika menerima gratifikasi. 3. Audit berkala kelayakan dokumen perizinan oleh tim pengawas internal.													Tim Pelaksana Pengola Konflik Kepentingan	Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana	

